

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, Sosialisasi Aplikasi Silampah Sebagai Upaya Pengelolaan Lingkungan di Kota Semarang (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup) sudah berjalan sesuai dengan indikator-indikator berdasarkan teori Rush & Althoff (2013), meliputi agen sosialisasi politik, materi sosialisasi politik, mekanisme sosialisasi politik dan pola sosialisasi politik. Sosialisasi Aplikasi Silampah sudah menjawab rumusan masalah-masalah yang menjadi fokus peneliti terkait pelaksanaan sosialisasi dan faktor yang mempengaruhi upaya sosialisasi.

4.1 Teknis pelaksanaan sosialisasi

Secara teknis, pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Silampah sudah dilaksanakan sesuai dengan indikator-indikator dari teori Rush & Althoff (2013). Upaya sosialisasi Aplikasi Silampah telah dilaksanakan sesuai dengan indikator agen sosialisasi. Hal ini dapat dijelaskan melalui upaya berbagai *stakeholder* seperti Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berperan dalam mengedukasi masyarakat terkait Aplikasi Silampah. Khususnya dalam hal ini, Staff Silampah telah mencontohkan bagaimana peran instansi dan organisasi yang sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Pada Oktober 2018, kegiatan sosialisasi *offline* dilakukan pertama kali di Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Selain itu, acara ini diadakan di Balai Kota Semarang dan di beberapa kecamatan Kota Semarang seperti Kecamatan Tembalang, Gunungpati, Banyumanik, dan Candisari.

Dapat disimpulkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang khususnya Staff Silampah telah berupaya melaksanakan sosialisasi agar masyarakat dapat mengenali program Aplikasi Silampah untuk tercapainya tujuan visi dan misi serta peningkatan partisipasi masyarakat.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi

Pada sosialisasi Aplikasi Silampah, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Silampah harus terhenti karena beberapa faktor. Salah satunya yaitu keterbatasan anggaran oleh Pemerintah Kota Semarang. Pada Aplikasi Silampah, kisaran anggaran yang sebelumnya disediakan mencapai 10 miliar.

Fenomena yang dapat kita temukan saat ini Pemerintah Kota Semarang kurang memperhatikan program kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan. Kisaran anggaran yang sebelumnya disediakan mencapai 10 miliar. Namun, pemerintah tidak lagi menganggarkan program tersebut sehingga pelaksanaan dan upaya sosialisasi Aplikasi Silampah harus terhenti.

Selain itu, faktor eksternalnya adalah sistem sosialisasi dan SOP (Standar Prosedur Operasi) yang belum jelas. Hal ini ditandai dengan terbatasnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang Aplikasi Silampah yang berdampak pada pelaksanaan serta upaya sosialisasi program tersebut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang tidak menyempurnakan sistem sosialisasi agar dapat dengan mudah menjangkau seluruh masyarakat.

Pada sosialisasi Aplikasi Silampah, sistem sosialisasi yang dilakukan hanya terdiri dari perwakilan masyarakat, Kepala Desa dan Pemimpin Kecamatan (Camat) Kota Semarang. Dapat disimpulkan, sistem sosialisasi tersebut tidak menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini menyebabkan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang didapat masyarakat. Sehingga pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kota Semarang tentang Aplikasi Silampah masih sangat terbatas.

2. Dampak & pembelajaran (*lesson learnt*) dari sosialisasi

Dalam menjaga keseimbangan ekologi dan sumber daya alam untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan, program aplikasi silampah sangat berperan peran penting sebagai salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Namun, sayangnya program ini harus terhenti karena kendala-kendala yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan program tersebut salah satunya keterbatasan anggaran dan sistem sosialisasi serta SOP (Prosedur Operasi Standar) yang belum jelas.

Dapat disimpulkan, perhatian khusus untuk program Aplikasi Silampah masih sangat kurang. Keterbatasan anggaran dan sistem sosialisasi serta SOP (Prosedur Operasi Standar) yang belum jelas menyebabkan pelaksanaan dan upaya sosialisasi tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai tujuan dan visi misinya. Tentunya pengelolaan anggaran sangat mempengaruhi Aplikasi Sampah sebagai salah satu program di bidang lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjadi solusi masalah utama di Kota Semarang yaitu masalah sampah. Jika dilakukan pengawasan, pemantauan dan pengelolaan, maka Aplikasi Silampah dapat menjadi contoh program kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan yang akan membantu untuk mengatasi masalah sampah sehingga manfaatnya dapat dirasakan untuk seluruh masyarakat Kota Semarang.

Sistem sosialisasi dan SOP (Prosedur Operasi Standar) yang lebih jelas juga diperlukan dalam upaya sosialisasi Aplikasi Silampah. Sistem sosialisasi merupakan standar dalam melaksanakan upaya sosialisasi agar lebih terarah dan optimal untuk mengenalkan suatu kebijakan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan sistem sosialisasi yang akan digunakan pada suatu kebijakan, tentunya hal ini memerlukan kerja sama berbagai *stakeholder* seperti Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berperan penting dalam menciptakan suatu kebijakan. Sehingga, upaya sosialisasi program kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik untuk kedepannya.

Pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama dalam melaksanakan setiap peraturan dan kebijakan sesuai konstitusi negara. Sehingga setiap kebijakan dalam berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Pada kasus Aplikasi Silampah, sistem sosialisasi dan SOP (Prosedur Operasi Standar) yang jelas dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, lembaga/instansi sebagai pihak yang berkaitan sangat diperlukan dalam pelaksanaannya. Tidak hanya pemerintah sebagai pengelola kebijakan namun masyarakat juga berperan penting sebagai pendukung keberhasilan program. Hendaknya Aplikasi Silampah ini dapat menjadi pembelajaran untuk program kebijakan lainnya agar pemerintah kota dapat menciptakan suatu kebijakan khususnya di bidang pengelolaan lingkungan dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang, tidak hanya sekedar menjadi formalitas namun berguna untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah waktu dan narasumber penelitian. Peneliti menyadari masih adanya kekurangan pada temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa dan beberapa lokasi narasumber khususnya perwakilan masyarakat Kota Semarang berkaitan dengan pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Silampah di Kota Semarang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

4.2 Saran

1. Pada pelaksanaan sosialisasi Aplikasi Silampah masih terdapat kendala salah satunya yaitu keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Kisaran anggaran yang sebelumnya disediakan untuk Aplikasi Silampah mencapai 10 miliar yang dikelola untuk keperluan Aplikasi Silampah di *Command Center*, sarana dan prasarana, serta upaya sosialisasinya baik secara *online* maupun *offline*. Namun, pemerintah tidak lagi menganggarkan program tersebut sehingga pelaksanaan dan upaya sosialisasi Aplikasi Silampah harus terhenti. Pemerintah Kota Semarang perlu lebih memperhatikan suatu kebijakan khususnya dibidang pengelolaan lingkungan terkait sampah karena merupakan salah satu masalah utama di Kota Semarang. Diharapkan kedepannya setiap program kebijakan yang akan diciptakan dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang agar tidak terhenti (*down*).
2. Diperlukannya sistem sosialisasi dan SOP (Standar Prosedur Operasi) yang jelas terkait Aplikasi Silampah. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan dan upaya sosialisasi dapat menjangkau seluruh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami tujuan program tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan dan upaya sosialisasi suatu kebijakan. Diharapkan dari kasus Aplikasi Silampah, hal ini dapat menjadi contoh untuk perbaikan program lainnya khususnya dibidang pengelolaan lingkungan.